BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepabeanan

2.1.1 Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala suatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas barang masuk dan barang keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan utama aparat pabean meliputi:

- Pelayanan;
- Pengawasan;
- Pemungutan bea atas barang keluar/ekspor (bk) dan barang masuk (bea masuk).

Pengawasan terhadap barang ekspor dan impor dilaksanakan, karena menyangkut aspek keamanan nasional, perekonomian, lingkungan hidup (hankamnas) dan lain-lain. Pemungutan bea keluar (bk) dan bea masuk (bm) menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara.

Berdasarkan azas domisili, maka setiap barang impor untuk dipakai wajib dibayar pajaknya.

2.1.2 Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011: 379).

Menurut Susilo (2008: 101) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013: 13).

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah (Purba, 1983: 51).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2.2. Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk(UU.No.10/95).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kep. Menkeu No. 453/KMK 04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No.112/KMK 04/2003. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan DJBC No.112/mk 04/2003 (Sasono, 2012: 107).

2.2.1 Daerah Pabean

Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2.2.2 Kawasan Pabean

Adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2.2.3 Penjaluran

Barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif, dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif inilah ditetapkan jalur pengeluaran barang, yaitu :

a. Jalur merah

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Importir atau perusahaan yang terbiasa terkena jalur merah biasanya perusahaan baru atau perusahaan yang mempunyai resiko tinggi dalam pelaksanaannya dan ketentuan lainnya.

b. Jalur hijau

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Kriteria importir yang terkena jalur hijau importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah.

c. Jalur kuning

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Importir tersebut belum terlalu dikenal kejujurannya oleh aparat Bea dan Cukai. Lazimnya, mereka adalah importir pemula atau importir yang pernah melakukan *illegal activities* dan masuk dalam daftar hitam.

d. Jalur prioritas

Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, setelah ada penetapan dari Pemerintah terhadap importir jalur prioritas tersebut. Importir yang terkena jalur prioritas biasanya ditetapkan oleh Pemerintah

2.2.4 Pemberitahuan pabean

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dibuat dengan modul importir/PPJK
2. Dokumen pelengkap pabean antara lain:
 - a. PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.
 - b. *Invoice* adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan nama, jumlah dan harga yang harus dibayar oleh pembeli.
 - c. *Packing List* adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis, jumlah, berat dan volume barang/komoditi dalam perdagangan internasional.
 - d. *Bill of Lading* adalah dokumen perjalanan barang melalui laut/dokumen pengapalan yang menyatakan bukti penerimaan barang bukti kepemilikan barang dan bukti adanya kontrak/perjanjian pengangkutan.
 - e. Polis Asuransi adalah suatu perjanjian asuransi ataupun pertanggungan untuk melindungi barang dari berbagai macam resiko.

- f. Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) atau yang sekarang ini disebut BILLING adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor seperti cukai, bea masuk, PPN/PPn-BM, PPh pasal 22 impor.
- g. Surat Kuasa adalah sebuah surat yang menyatakan pemberian wewenang untuk melakukan sebuah kegiatan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang keduanya menyertakan bukti sah dengan pernyataan disertai materai atau tanda tangan sebagai bukti(Sasono, 2012: 109).

2.3. Keberatan

2.3.1 Pengertian Keberatan

Adalah suatu permohonan tertulis yang dapat diajukan oleh pengusaha atau wajib bea atau wajib cukai kepada Ditjend Bea dan Cukai yang berisi keberatan antara lain terhadap:

- a. Penetapan tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tambah bayar bea masuk, cukai, dan PDRI dengan diterbitkannya Nota Pembetulan/SKPBM, hasil temuan, verifikasi, atau hasil temuan audit.
- b. Penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea Cukai yang mengakibatkan tambah bayar.
- c. Penetapan atas penutupan buku rekening barang kena cukai yang mengakibatkan tambah bayar.

- d. Penetapan atas pengenaan sanksi administrasi di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa SKPBM (Sani, 2007: 156).

2.3.2 Pengajuan Keberatan

1. Diajukan secara tertulis Kepada Dirjen melalui KPUBC/KPPBC
 - Penetapan Pejabat Bea Cukai di KPPBC / KPUBC
 - Penetapan Pejabat Bea Cukai di KWBC
 - Penetapan Pejabat Bea Cukai di KPUBC / KPPBC atas hasil Audit.
2. Diajukan oleh orang yang berhak
 - Orang pribadi
 - Orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan (pengurus), dalam hal diajukan oleh badan hukum.
 - Orang yang diberi kuasa oleh orang sebagaimana dimaksud di atas

2.3.2.1 Lampiran Pengajuan

Pengajuan keberatan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Surat permohonan pengajuan keberatan
- Fotokopi penetapan pejabat (SPTNP).
- Fotokopi BPJ atau bukti pelunasan atau surat pernyataan (dalam hal pengajuan keberatan tanpa menyerahkan jaminan)
- Dokumen Impor
- Legalitas perusahaan
- Dokumen pendukung lainnya

2.3.2.2 Penyerahan Jaminan

a. Jaminan

Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Jaminan memperlihatkan suatu ikhtikad baik dan tanggung jawab importir dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban pabean. Hak-hak yang dituntut oleh importir harus dikompensasikan dengan kewajibannya memberikan jaminan untuk meyakinkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bahwa importir akan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku (Sani, 2007: 35). Sesuai Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1995 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, jaminan yang diterima DJBC dapat berbentuk:

b. Macam – macam Jaminan :

- Jaminan Tunai (uang tunai)

Jaminan tunai adalah jaminan yang diserahkan kepada DJBC, dalam bentuk uang tunai untuk menjamin pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, dan PDRI. Jangka waktu jaminan tunai:

Selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 (tiga puluh) hari untuk waktu:

- Impor barang yang mendapat fasilitas di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

- Impor sementara.
- Impor barang yang diberi izin pengeluaran lebih dahulu dengan penangguhan bea masuk dan pungutan impor lainnya.

Selama 90 (sembilan puluh) hari untuk:

- Pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean yang diajukan keberatan.
- Pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat sanksi administrasi yang ditetapkan oleh Pejabat BC yang diajukan keberatan (Sani, 2007: 36).

- Jaminan Bank

Jaminan bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wan prestasi). Jaminan bank yang dapat diterima sebagai jaminan pembayaran atas pungutan negara adalah jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi. Jangka waktu jaminan bank:

Selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 (tiga puluh) hari untuk:

- Impor barang yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

- Impor Sementara.
- Pungutan negara untuk impor barang yang diberikan izin pengeluaran barang lebih dahulu dengan penangguhan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
- Selama 90 (sembilan puluh) hari untuk:
- Pelunasan pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan Pejabat Bea Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean yang diajukan keberatan.
- Sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat BC yang diajukan keberatan.

Perpanjangan jangka waktu jaminan bank hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Bea Cukai atau Pejabat yang ditunjuk, yang tembusannya disampaikan kepada bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo jaminan bank yang bersangkutan. Pelunasan pungutan negara yang dijamin dengan jaminan bank dilakukan oleh Bank Devisa Persepsi yang menerbitkan jaminan bank yang dimaksud (Sani, 2007: 37-38).

- Jaminan dari Perusahaan Asuransi (*Custom Bond*)

Jaminan dari perusahaan asuransi atau *custom bond* adalah perikatan jaminan antara tiga pihak, dimana pihak pertama (*surety*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (*principal*) terhadap pihak ketiga (*obligee*) dalam hal pihak kedua

tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. *Surety* adalah perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai izin di Indonesia untuk melakukan penutupan *customs bond*. *Principal* (terjamin) adalah perusahaan yang mendapat fasilitas penangguhan/pembebasan pungutan negara dan terikat kewajiban yang timbul dari fasilitas tersebut. *Obligee* (penerima jaminan) adalah Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jendral Bea Cukai atau Kepala Bapeksta Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya. Jangka waktu berlakunya *customs bond* sesuai dengan jangka waktu jaminan bank 30 (tiga puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari dengan peruntukan penjaminan yang sama. Perpanjangan jangka waktu belakunya *customs bond* langsung dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari (Sani, 2007: 40-43):

- Direktur Jendral Bea Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan fasilitas Bapeksta Keuangan.
- Kepala Bapeksta Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan fasilitas Bapeksta Keuangan.

2.3.2.3 Penyerahan Berkas Permohonan Keberatan

- Berkas permohonan keberatan disampaikan secara langsung

- Diperiksa kelengkapan oleh Pejabat BC (diperiksa oleh front desk atau unit perbendaharaan, atau ditentukan lain oleh kepala kantor dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan kelengkapan dan penerbitan tanda terima).

2.3.2.4 Alasan-alasan keberatan.

- a. Jenis keberatan (tarif, nilai pabean, cukai, sanksi administrasi).
- b. Argumentasi/alasan pengajuan keberatan.
- c. Data dan bukti untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan (Sani, 2007: 158).

2.3.2.5 Jangka waktu pengajuan keberatan

- a. Dalam hal keberatan menyangkut tarif/nilai pabean: selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- b. Dalam hal keberatan menyangkut sanksi administrasi: selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan (Sani, 2007: 158).

2.3.2.6 Keputusan Keberatan

Memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterima pengajuan keberatan, Keputusan keberatan kepabeanan:

- Mengabulkan seluruhnya
- Menolak seluruhnya atau sebagian
- Menetapkan lain

Keputusan dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, Dikirimkan kepada Pemohon paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal keputusan dan dinyatakan dengan:

- Tanda terima
- Bukti pengiriman surat
- Bukti pengiriman lainnya

Keberatan dianggap dikabulkan bila dalam waktu 60 hari tidak diputuskan.

2.4. Banding

Banding adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pengusaha atau wajib bea/wajib cukai kepada Badan Peradilan Pajak akibat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai menolak yang bersangkutan sehingga pemohon merasa dirugikan. Menurut Sani (2007: 164) pengajuan banding bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak yang keberatan terhadap keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai atas permohonannya dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Badan Peradilan Pajak) setelah melunasi pembayaran sesuai keputusan keberatannya itu.
2. Pengajuan banding ini dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan.